

PENGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

DEDE WIDIASTUTI ZURAI DA

ABSTRAK

Pada dasarnya, semua tindakan penyidik melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyidik dalam menjalankan tindakan penggeledahan tersebut sangat menyentuh hak-hak asasi, bahkan pada Pasal 167 dan Pasal 469 KUHP mengancam pidana terhadap pelanggaran tersebut. Penggeledahan dilakukan bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dapat juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat kediaman. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHP. 2. Menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHP, harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini guna menjamin hal asasi seseorang atas rumah kediamannya. Ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya. Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (Pasal 33 ayat (2) KUHP beserta penjelasannya). 2. Pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penggeledahan dari kepolisian, Didampingi 2 orang saksi apabila Tersangka atau penghuni membolehkan dengan baik dalam arti rela dan setuju kediamannya dimasuki dan digeledah. Harus ada Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan “surat tugas”, disamping ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, Dalam perspektif untuk menjaga hak asasi manusia maka penggeledahan dilakukan atas izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga Penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang digunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan.

Kata Kunci : Penggeledahan, Hak Asasi Manusia, Pidana

SEARCHES UNDER CRIMINAL PROCEDURE LAW IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

DEDE WEDIASTUTI ZURaida
ABSTRACT

In essence, all investigative actions undertake a search in a very necessary and urgent situation when the investigator must act immediately and it is not possible to obtain a license first. The investigator in carrying out the search action is very touching on human rights, even in Article 167 and Article 469 of the Criminal Code threatening the criminal against such violation. Searches are conducted not only to conduct checks, but also to arrest and foreclosure. The search action is basically a violation of human rights which prohibits any person to interfere with private life, family and residence. The purpose of this study is 1. Analyze the obligation of investigators in conducting searches under the Criminal Procedure Code. 2. Analyze the conduct of searches in criminal procedure law and human rights perspective. With the normative juridical research method it is known that 1. The obligation of the investigator in conducting the search under the Criminal Procedure Code, there must be a letter of permission from the local district court chairman. This is to guarantee a person's basic life of his home. This is stipulated in Article 33 paragraph (1) of KUHAP and its explanation. If the investigator of the house is not a self-investigator, then other police officers should be able to show in addition to the letter of the chairman of the district court as well as a written warrant from the investigator (Article 33 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and its explanation). 2. The searching of a criminal procedure law is proved by a search warrant from the police, accompanied by 2 witnesses if the suspect or the resident permits well in the sense of willingly agreeing to his residence being searched and ransacked. There should be a search warrant issued by the head of the local district court. Police officers carry and display "letters of duty", in addition to a search warrant from the Chairman of the District Court, In a perspective to safeguard human rights, the search is made under a search warrant is the Head of the District Court. So that Search is not an effort that can be easily used by investigators without restrictions and supervision.

Keywords : Search, Human Rights, Criminal